

Jurnal of Development Economic and Digitalization

Vol. 3, No. 1, 2024, pp. 109-129
P-ISSN 2963-6221 – E-ISSN 2962-8520

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 – 2022

Luthfiah Syahrazad^{1*}, Ully Vidriza²

¹yaraluthfiah11@gmail.com, ²ullyavidriza@upnvj.ac.id

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Penulis Korespondensi

Received: 13 Februari 2024

Published: 29 Februari 2024

Abstrak

Provinsi Papua memiliki beragam potensi yang dapat menunjang perekonomian. Akan tetapi, Provinsi Papua masih belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki ditandai oleh sangat tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua sehingga dikenal sebagai provinsi termiskin pertama di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua. Data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 – 2022 digunakan sebagai data pada penelitian ini. Penelitian menggunakan analisis regresi data panel dengan random effect model (REM) dan pengujian asumsi klasik serta hipotesis dengan STATA 17. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua. Secara individu, jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan bagi pemerintah Provinsi Papua untuk mengiringi peningkatan jumlah penduduk dengan kualitas sumber daya manusia, peningkatan indeks pembangunan manusia dengan kualitas manusia yang riil, dan menekan angka pengangguran dengan memperluas dan menyamaratakan persebaran sektor lapangan kerja.

Kata Kunci: Indeks Kedalaman Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Papua

Abstract

Papua Province has various potentials that can support the economy. However, Papua Province is still unable to optimize its potential marked by the very high level of poverty in Papua Province so that it is known as the first poorest province in Indonesia. This study aims to analyze and determine the effect of population, open unemployment rate, and human development index (HDI) on the poverty depth index in Papua Province. The data used in this study is secondary data from Badan Pusat Statistik in 2017 – 2022. The study used panel data regression analysis with random effect model and testing classical assumptions and hypotheses with STATA 17. The result is the population, open unemployment rate, and HDI together have a significant effect on the poverty depth index in Papua Province. Individually, population has a significant positive effect on the poverty depth index. Meanwhile, the open unemployment rate and HDI have a significant negative effect on the poverty depth index in Papua Province. The Papua Provincial government is expected to accompany the increase in population with the quality of human resources, increase the HDI with real human quality, and reduce unemployment by expanding and generalizing the distribution of the employment.

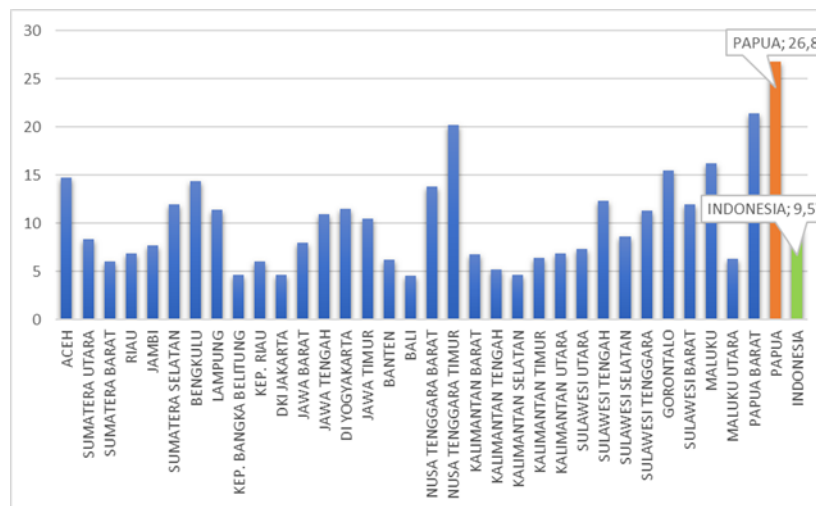
Keywords : *Poverty Depth Index, Population, Open Unemployment Rate, Human Development Index, Papua Province*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan yang terkendali menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan (Tambun & Herawaty, 2018). Kemiskinan merupakan masalah sosial jangka panjang yang sangat kronis dan kompleks. Hingga saat ini, kemiskinan sangat sulit untuk diatasi sehingga membutuhkan tahapan analisis yang tepat, tidak bersifat sementara, dan berkelanjutan sebagai upaya penanggulangannya (Ahmaddien, 2019). Salah satu faktor yang menghambat majunya suatu daerah atau negara adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi penyebab turunnya kualitas sumber daya manusia (SDM) karena adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan nutrisi yang baik sehingga berimbas pada melemahnya tingkat produktivitas (Agus Triono et al., 2023). Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), terdapat tujuan pembangunan tepatnya pada tujuan satu yakni tanpa kemiskinan. Dengan masih adanya kemiskinan sebagai permasalahan bagi pembangunan ekonomi, menunjukkan bahwa tujuan satu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih belum tercapai.

Kemiskinan seolah menjadi hutang permasalahan ekonomi di Indonesia yang tak kunjung tuntas, khususnya di Provinsi Papua. Secara teori, daerah yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah seperti Papua seharusnya mampu untuk menjadi daerah yang maju dengan diiringi oleh SDM dan faktor-faktor pembangunan lainnya yang berkualitas baik. Provinsi Papua dapat dikatakan sudah memiliki modal yang berlimpah dan sangat mendukung untuk dapat mengembangkan, menata, mengelola, dan mengunggulkan segala bentuk potensi yang ada di daerahnya (Ismail, 2020). Potensi kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Papua seharusnya dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan keberlangsungan daerah-daerah di sekitarnya. Faktanya, Provinsi Papua masih belum mampu mengelola dan mengunggulkan potensinya tersebut dibuktikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia pada Tahun 2022

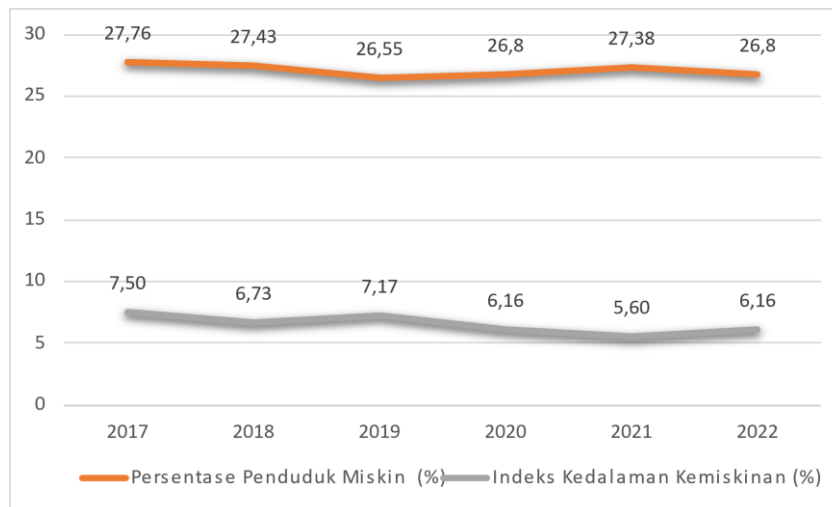


Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Pada tahun 2022, kemiskinan Papua berada pada posisi paling tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi Papua berada pada persentase 26,80 persen atau berada pada peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan Provinsi Papua melampaui tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022. Posisi yang sangat tinggi inilah tentu menjadi sebuah pertanyaan mengapa daerah dengan potensi yang berlimpah tersebut justru dikenal sebagai provinsi termiskin, bahkan sangat

jauh apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan negara Indonesia (Hany & Mafruhah, 2023).

Gambar 2. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017 – 2022



Sumber: (BPS Provinsi Papua, 2023)

Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua apabila dilihat dari persentase penduduk miskin pada tahun 2017 hingga tahun 2022 sangat fluktuatif setiap tahunnya. Tingkat kemiskinan tahun 2017 sebesar 27,76 persen turun menjadi 26,80 persen pada tahun 2022. Kabupaten Intan Jaya adalah kabupaten termiskin dengan persentase sebesar 42,03 persen. Sementara itu, Kabupaten Merauke adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah. Dengan demikian, perlu diketahui dan dianalisis terkait faktor-faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dari tahun 2017 hingga tahun 2022 sangat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, tetapi penurunan tersebut hanya berada pada angka sekitar satu persen saja. Dengan kata lain, penurunan yang tercipta bukanlah penurunan pada persentase yang besar dan signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dari tahun 2017 hingga tahun 2022 selalu berada kondisi yang memprihatinkan karena selalu berada pada posisi pertama sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa Provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan yang rendah pada tiap tahunnya.

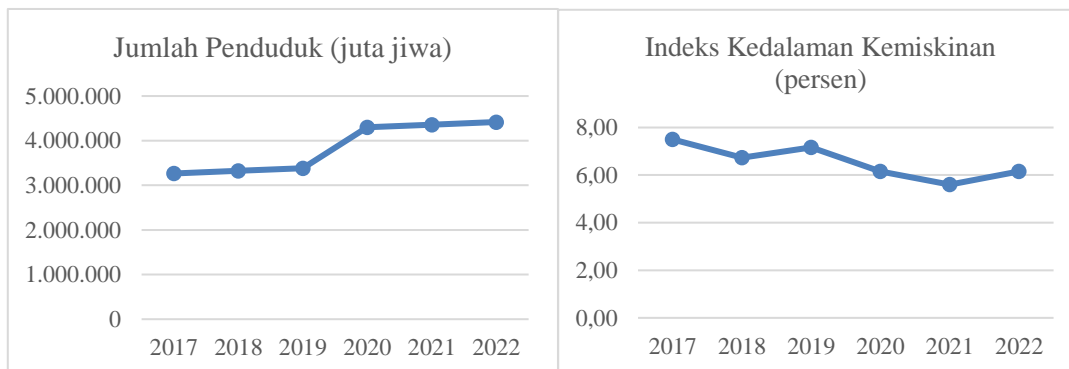
Keberhasilan dalam hal pengupayaan kemiskinan juga dapat diukur dan dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1). Kehidupan ekonomi suatu penduduk miskin akan terlihat lebih jelas kadar keterpurukannya berdasarkan nilai nilai P1 atau indeks kedalaman kemiskinan. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinannya (P1), maka akan semakin tinggi pula rata-rata kesenjangan pengeluaran yang dimiliki penduduk miskin pada garis kemiskinan (Pemerintah Daerah Provinsi Papua, 2022). Pada gambar terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2017 hingga 2022 sangat fluktuatif dengan perbedaan angka yang tidak terlalu jauh. Pada tahun 2017, indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Papua menyentuh persentase 7,50 persen hingga kemudian menurun menjadi 6,16 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan positif, tetapi persentase tersebut masih berada jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan Indonesia tahun 2022 yang hanya sebesar 1,59 persen.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, wilayah perdesaan adalah wilayah yang mendominasi kemiskinan di Provinsi Papua. Apabila dilihat dari persentase penduduk miskin, kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 35,39 persen. Sementara itu, tingkat

kemiskinan di wilayah perkotaan adalah sebesar 5,02 persen. Apabila dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan, kemiskinan di Provinsi Papua juga didominasi oleh wilayah perdesaan. Indeks kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan Provinsi Papua berada pada persentase 8,47 persen. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Papua berada pada persentase 0,53 persen. Sangat terlihat jelas bahwa terdapat ketimpangan kondisi kemiskinan di wilayah perdesaan dan perkotaan di Provinsi Papua. Dengan demikian, diperlukan adanya pemerataan aktivitas ekonomi sehingga tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.

Menurut penelitian sebelumnya, faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan adalah jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Besarnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi kemiskinan. Sebagaimana disebutkan pada teori Malthus, faktor penting yang harus dipenuhi untuk mendukung permintaan modal manusia adalah dengan menciptakan alur yang berkelanjutan pada laju pertumbuhan penduduknya. Akan tetapi, tanpa diikuti oleh adanya kemajuan pada faktor pembangunan yang lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi justru tidak dapat meningkatkan permintaan dan pendapatan atau bahkan dapat memberikan efek negatif terhadap masalah kemiskinan (Ristika et al., 2021).

Gambar 3. Jumlah Penduduk dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017 – 2022



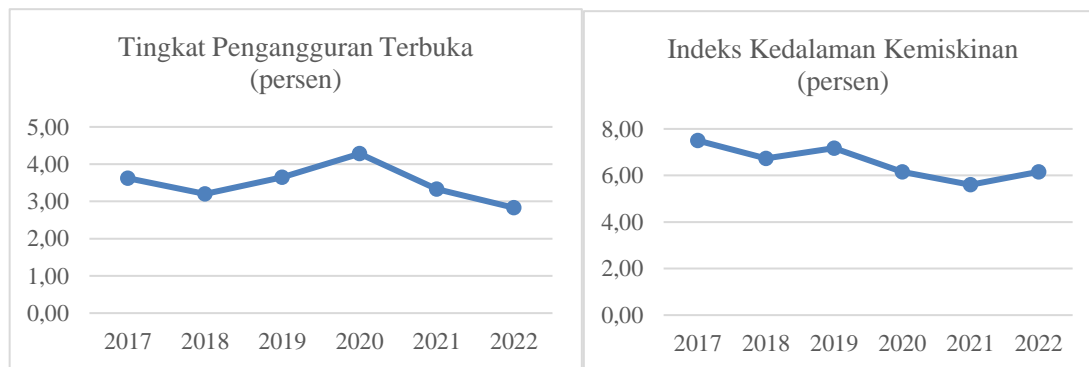
Sumber: (BPS Provinsi Papua, 2023)

Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Provinsi Papua adalah sebanyak 4.418.581 jiwa. Sejak tahun 2017, jumlah penduduk di Provinsi Papua terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 3.379.302 jiwa menjadi 4.303.707 jiwa pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun tersebut terjadi sebesar 924.405 jiwa yang disebabkan karena negara Indonesia sedang berada pada masa bonus demografi. Peningkatan jumlah penduduk terus terjadi di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2022. Persebaran jumlah penduduk Papua pada tahun 2022 tidak merata di setiap kabupaten/kota. Hal tersebut dikatakan karena terdapat kabupaten/kota yang luas wilayahnya kecil tetapi jumlah penduduknya besar, begitupun sebaliknya. Kota Jayapura adalah kota dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 410.852 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Supiori adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terendah dengan 23.247 penduduk (BPS Provinsi Papua, 2023)

Menurut penelitian sebelumnya, jumlah penduduk menunjukkan pengaruh secara signifikan positif terhadap kemiskinan yang dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya jumlah penduduk menyebabkan kemiskinan tinggi pula. Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan pengeluaran beban biaya hidup bertambah. Apabila tidak dapat memenuhi

beban biaya hidup tersebut, maka akan menimbulkan ketergantungan ekonomi sehingga menimbulkan kemiskinan (Bella & Huda, 2023). Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Papua. Berdasarkan gambar tiga di atas, peningkatan jumlah penduduk yang terjadi sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 tersebut diiringi oleh peningkatan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2018 ke tahun 2019 dan pada tahun 2021 ke tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang terjadi memberikan dampak yang negatif dengan meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk di tiap tahunnya dapat menjadi suatu masalah bagi pemerintah apabila tidak dapat dikendalikan. Adanya jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya, dapat menjadi penyebab munculnya tingkat kemiskinan yang semakin tinggi (Hany & Mafruhah, 2023).

Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2017 – 2022



Sumber: (BPS Provinsi Papua, 2023)

Permasalahan kemiskinan atau faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan berkaitan dengan kependudukan yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pada angkatan kerja, akan menciptakan pengangguran sebagai faktor penyebab kemiskinan. Pada gambar di atas, TPT di Provinsi Papua sejak tahun 2017 hingga 2022 sangat fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2020, terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,63 persen yang diprediksi karena adanya pandemi covid-19. Kota Jayapura merupakan kota dengan TPT tertinggi di Provinsi Papua. Sedangkan Kabupaten Puncak Jaya merupakan kabupaten dengan TPT di Provinsi Papua. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan TPT di wilayah perkotaan dan perdesaan Provinsi Papua (BPS Provinsi Papua, 2023).

Pada penelitian sebelumnya, TPT menunjukkan pengaruh secara negatif dan signifikannya terhadap kemiskinan. Pada umumnya, seharusnya TPT memiliki pengaruh secara positif terhadap kemiskinan. Adanya penurunan pada TPT seharusnya berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan pula. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang tidak berpenghasilan dan kesulitan memenuhi kebutuhannya semakin berkurang. Akan tetapi, tidak selamanya penurunan pada angka pengangguran selalu diikuti oleh penurunan pada angka kemiskinan (Sinaga, 2020). Hal tersebut selaras dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Papua bahwa rendahnya tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini tidak menjamin tingkat kemiskinannya menjadi rendah.

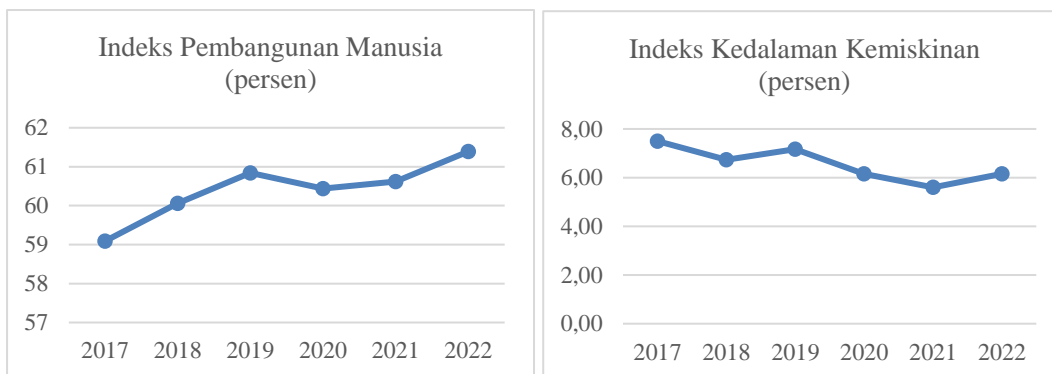
Rendahnya angka tingkat pengangguran terbuka tersebut ternyata hanya didominasi oleh tenaga kerja di Provinsi Papua yang masih bekerja pada sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan saja. Tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Papua tidak merata persebaran sektornya, tetapi hanya memenuhi sektor tertentu saja. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan publikasi BPS Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua tahun 2022, menyebutkan bahwa sebesar 71,49 persen penduduk 15 tahun ke atas bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tingkat pengangguran terbuka justru banyak terjadi pada sebagian besar tenaga kerja Papua yang berpendidikan tinggi. Adanya sikap selektif tenaga kerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan lulusannya menjadi penyebab tingkat pengangguran terbuka terjadi pada tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Selain itu, permintaan tenaga kerja di Provinsi Papua lebih terbuka untuk pekerja dengan tingkat pendidikan rendah karena dapat menekan biaya produksi dengan memberikan upah yang lebih rendah. Dengan adanya penjelasan mengenai kondisi tingkat pengangguran terbuka dan tenaga kerja di Provinsi Papua tersebut, maka penulis tertarik untuk menggunakan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel bebas untuk kemudian diteliti sebagai salah satu faktor terjadinya kemiskinan di Provinsi Papua.

Selain faktor jumlah penduduk dan faktor tingkat pengangguran terbuka, kualitas sumber daya manusia juga dijadikan sebagai faktor pengaruh kemiskinan. Capaian pembangunan suatu manusia diukur dengan memusatkan perhatian pada tiga dimensi mendasar, yaitu tingkat pengetahuan, usia yang panjang, dan taraf hidup layak (Hany & Mafruhah, 2023). Indeks pembangunan manusia dapat menentukan kualitas pembangunan manusia. Tingkat produktivitas SDM di suatu masyarakat akan semakin rendah apabila indeks pembangunan manusianya semakin rendah. Rendahnya tingkat produktivitas menyebabkan pendapatan yang diperoleh rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan (Florenzia & Karmini, 2022).

Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017 – 2022



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Pada gambar di atas terlihat bahwa IPM Papua pada tahun 2017 adalah 59,09 persen kemudian mengalami peningkatan menjadi 61,39 persen pada tahun 2022. Angka tersebut membuat Provinsi Papua memiliki tingkat IPM dengan kategori sedang karena berada pada rentang antara 60 hingga <70. Angka IPM yang diperoleh Provinsi Papua masih berada di bawah capaian angka IPM nasional yang telah berada pada kategori tinggi tepatnya pada angka 72,91 persen. Nilai IPM tertinggi berada di Kota Jayapura yakni sebesar 80,61 persen dan Kabupaten Nduga memiliki nilai IPM terendah yakni sebesar 34,1 persen.

Menurut penelitian sebelumnya, IPM memberikan pengaruh secara signifikan negatif pada kemiskinan. Dijelaskan bahwa peningkatan pada IPM berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Semakin baiknya nilai IPM suatu daerah akan berdampak

positif bagi penurunan kemiskinan karena didukung oleh adanya tingkat produktivitas yang tercipta dan didasari oleh tercapainya pengetahuan, usia yang panjang, dan taraf hidup layak (Hany & Mafruhah, 2023). Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Papua, menggambarkan gap yang bertentangan dengan teori dan penelitian tersebut. Teori Nurkes menjelaskan bahwa tingginya produktivitas sebagai akibat dari tingginya IPM akan menyelamatkan seseorang dari kemiskinan. Dapat dijelaskan bahwa IPM Papua memang cenderung meningkat di setiap tahunnya dan berada pada kategori sedang, tetapi kemiskinan di Provinsi Papua masih tinggi. Diketahui bahwa IPM Papua masih berada di bawah posisi IPM Indonesia yang telah berada pada kategori tinggi dengan persentase 72,91 persen. Apabila dibandingkan dengan IPM di tiap provinsi di Indonesia, IPM Papua juga masih berada pada posisi paling rendah di tiap tahunnya, tepatnya sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 diikuti oleh Provinsi Papua Barat sebagai provinsi dengan IPM terendah berikutnya.

Selain itu, masih terdapat disparitas pembangunan manusia apabila dilihat dari nilai IPM menurut kabupaten/kota. Dari 29 jumlah kabupaten/kota, terdapat 12 kabupaten dengan nilai IPM lebih tinggi dari IPM Provinsi Papua sendiri. Sedangkan 17 kabupaten lainnya memiliki nilai IPM lebih rendah dibanding nilai IPM Provinsi Papua. Perbedaan latar belakang, sosial, ekonomi, dan geografi merupakan penyebab terjadinya disparitas capaian pembangunan manusia di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Papua didominasi oleh masyarakat berpendidikan rendah sehingga produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang tercipta pun rendah. Fenomena-fenomena tersebutlah yang mungkin menjadi penyebab mengapa dengan nilai IPM yang berada pada kategori sedang, tetapi kemiskinan di Papua masih tinggi. Penjelasan mengenai kondisi IPM di Provinsi Papua ini tentu memiliki dampak yang berarti bagi kemiskinan di Provinsi Papua dan dapat dijadikan sebagai salah satu faktor untuk kemudian diteliti pengaruhnya bagi kemiskinan di Provinsi Papua.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk, TPT, dan IPM memiliki pengaruh yang inkonsistensi terhadap indeks kedalaman kemiskinan sebagai indikator untuk melihat kemiskinan di Provinsi Papua. Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan lebih lanjut untuk kemudian merekomendasikan beberapa dan kebijakan lebih lanjut sebagai upaya atas permasalahan yang terjadi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kemiskinan Ragnar Nurkse

Ragnar Nurkse (1953) dalam (Handayani, 2018) mengemukakan teori “Lingkaran Setan Kemiskinan” yang merupakan terjemahan dari teori aslinya yaitu “Vicious Circle of Poverty”. Dalam teori tersebut, Ragnar Nurkse memberikan suatu pengandaian pada suatu konstellasi atau lingkasan dari daya-daya yang saling berhubungan atau beraksi sedemikian rupa satu sama lain sehingga menyebabkan suatu negara atau wilayah miskin berada pada kondisi miskin secara terus menerus. Kemiskinan merupakan kondisi ekonomi yang ditandai oleh adanya kondisi pasar yang tidak sempurna, rendahnya kemampuan memiliki modal, dan keterbelakangan pada kualitas modal manusianya sehingga tercipta produktivitas yang rendah. Dalam teori “Lingkaran Setan Kemiskinan” atau “Vicious Circle of Poverty” ini terdapat tiga lingkaran pokok yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Ragnar Nurkse juga menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ekonomi yang ditandai oleh adanya kondisi pasar yang tidak sempurna, rendahnya kemampuan memiliki modal, dan keterbelakangan kualitas pada sumber daya manusia (SDM) sehingga menciptakan produktivitas yang berada pada posisi rendah. Dapat disimpulkan bahwa

faktor penyebab kemiskinan yang dikemukakan Ragnar Nurkes menekankan kepada adanya keterbelakangan, kekurangan modal, dan ketidaksempurnaan pasar yang kemudian berimbas kepada rendahnya tingkat produktivitas sehingga upah atau pendapatan yang diterima pun rendah. Rendahnya penghasilan yang diperoleh dapat menyebabkan investasi dan tabungan yang dimiliki menjadi rendah sehingga menyebabkan keterbelakangan. Hal ini berlangsung secara terus menerus mengikuti alur lingkaran yang selalu akan bertemu pada titik kondisi miskin (Nasution et al., 2021).

Teori Jumlah Penduduk

Thomas Robert Malthus (1798) dalam (Atmanti, 2017) mengemukakan teori “An Essay on the Principle of Population” yang membahas mengenai jumlah penduduk. Malthus pada teorinya mengemukakan bahwa pada dasarnya tanah adalah faktor produksi utama yang memiliki jumlah tetap, sedangkan manusia memiliki nilai yang berkembang. Keberlanjutan pada pertumbuhan penduduk menjadi faktor yang sangat penting dan diperlukan dalam mendukung suatu permintaan. Akan tetapi, jumlah penduduk atau populasi yang semakin tinggi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada meningkatnya biaya hidup. Kesulitan dalam membiayai hidup yang terus meningkat ini akan berakibat kepada kondisi kemiskinan. Malthus mengungkapkan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya pengawasan terhadap pertumbuhan penduduk.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut BPS, pengangguran terbuka adalah jumlah tenaga kerja yang tidak memiliki dan sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak memiliki dan tidak sedang mencari pekerjaan, dan belum mulai bekerja tetapi sudah memiliki pekerjaan. Adapun rumus perhitungan TPT menurut BPS adalah sebagai berikut:

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan:

PP = Jumlah dari pengangguran

PAK = Jumlah dari angkatan kerja

Tinjauan pustaka berisikan teori dan penelitian terdahulu terkait dengan bahasan penelitian, dijelaskan dengan terperinci dan bernarasi. Tinjauan pustaka dapat diakhiri dengan pengembangan dan pernyataan hipotesis penelitian secara eksplisit atau implisit dalam tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, harus ada diskusi yang dalam dari teori dan penelitian terdahulu sehingga pembaca dapat mengetahui teori dan hasil.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah sebuah langkah dalam proses memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat untuk kehidupan mereka, atau dapat dikatakan bahwa masyarakat diberikan berbagai pilihan untuk dipilih dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dan menjalani kehidupan yang terhormat dari segi sosial, ekonomi, dan budaya (United Nations Development, 1990). Pada tahun 1990, UNDP menetapkan tiga indikator pembentukan IPM yang tidak mengalami perubahan hingga saat ini adalah:

1. Usia yang panjang dan hidup yang sehat;
2. Standar kehidupan yang layak;
3. Pengetahuan.

Keberhasilan pada pembangunan di suatu negara sangat ditentukan oleh adanya peningkatan pada kualitas SDM yang ditandai oleh peningkatan pada IPM yang sejalan dengan peningkatan produktivitas sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pernyataan ini sejalan dengan teori Ragnar Nurkse (1953) yaitu pendidikan tinggi yang dimiliki oleh seseorang mencerminkan bahwa seseorang tersebut dapat memperoleh dan memiliki standar hidup yang layak. Adanya produktivitas kerja yang tinggi yang tercipta oleh adanya pendidikan tinggi yang dimiliki seseorang tersebut akan berimbas pada penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan bahwa kemiskinan dapat ditandai oleh rendahnya kualitas pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan. IPM dapat diketahui melalui perhitungan BPS berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_1 \times I_2 \times I_3} \times 100\%$$

Keterangan:

- I₁ = Indeks kesehatan
- I₂ = Indeks pendidikan
- I₃ = Indeks pengeluaran

3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah semua objek yang dijadikan sebagai sasaran pada penelitian yang memiliki sifat sama. Populasi juga merupakan suatu himpunan dari keseluruhan objek-objek yang diteliti (Nuryadi et al., 2017). Sejumlah 28 kabupaten beserta 1 kota yang berada di Provinsi Papua dan data mengenai jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM menjadi populasi dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, tidak menggunakan sampel. Hal tersebut dikarenakan sampel pada penelitian ini sudah termasuk ke dalam populasi, yaitu 28 kabupaten beserta 1 kota yang berada di Provinsi Papua pada tahun 2017 – 2022 dengan total secara keseluruhan berjumlah 174 data.

Teknik Pengumpulan Data

Data tidak langsung (sekunder) yang dikumpulkan melalui berbagai sumber publikasi data dan literatur seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, publikasi instansi pemerintahan dan swasta, dan jurnal-jurnal ilmiah baik itu yang sudah terpublikasi maupun belum terpublikasi digunakan sebagai data penelitian ini. Penelitian ini memperoleh berbagai data melalui situs resmi BPS beserta publikasi yang tersedia. Adapun data yang diperoleh yakni data-data kemiskinan, jumlah penduduk, TPT, dan IPM. Terkait pengumpulan data, peneliti melakukan dua cara penjabaran data untuk dapat memenuhi dan mendukung kebutuhan penelitian yaitu studi pustaka dengan menggunakan referensi penelitian dalam mengamati, mengkaji, dan menjabarkan berbagai macam sumber bacaan atau literatur. Sumber bacaan atau literatur berupa jurnal ilmiah, buku, situs atau website, dan berbagai sumber lainnya yang dapat menjelaskan inti pembahasan pada penelitian. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi yaitu penjabaran data yang dilakukan dengan pemanfaatan metode dokumentasi yaitu dengan membuat sebuah salinan mengenai data kemiskinan, jumlah penduduk, TPT, dan IPM ke dalam Microsoft Excel 2016. Proses pengolahan data sendiri menggunakan software STATA 17.

Teknik Analisis Data

Analisis regresi jenis data panel digunakan sebagai instrumen dan prosedur pengolahan data pada penelitian ini. Analisis data panel adalah kombinasi data periode waktu (time series) dan data cross section. Periode waktu (time series) merupakan data yang tergabung secara berurutan dari waktu ke waktu dengan satu atau lebih objek yang sama, sedangkan cross section adalah data yang berfokus pada beberapa variabel yang dikompilasikan secara bersamaan di satu waktu. Data time series penelitian ini adalah selama 6 tahun terakhir, terhitung dari tahun 2017 – 2022. Sementara itu, cross section-nya adalah 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Berdasarkan pada penjelasan ini, maka terbentuklah sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

$$IKK = \beta_0 + \beta_1 LNJPN_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- IKK = Indeks Kedalaman Kemiskinan
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi
- JPN = Jumlah Penduduk
- TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- LN = Log Natural
- i* = Cross Section
- t* = Time Series
- ε = Error Term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Obs	W	V	z	Prob>z
Uhat	174	0.95495	5.955	4.076	0.00002

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil, nilai *p value* pada uji normalitas ini adalah sebesar 0,00002 sehingga data dinyatakan terdistribusi tidak normal. Merujuk pada (Gujarati & Porter, 2013), hal tersebut adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan karena menurut asumsi *central limit theorem*, penelitian memiliki data observasi yang cukup besar ($n > 30$) sehingga dianggap tidak terjadi masalah normalitas pada penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	LNJPN	TPT	IPM
LNJPN	1.0000		
TPT	0.0902	1.0000	
IPM	0.1791	0.7544	1.0000

Sumber: Data diolah (2024)

Dapat terlihat pada tabel 2 hasil uji multikolinearitas bahwa nilai korelasi tiap variabel bebas tidak ada yang melampaui nilai 0.9 sehingga data pada penelitian tidak memiliki masalah multikolinearitas atau terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Antar Periode Waktu

Wooldridge test for autocorrelation in panel data	
H0: no first-order autocorrelation	
F (1, 28) =	0.084
Prob > F =	0.7740

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel hasil, uji autokorelasi antar periode waktu memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7740 atau lebih besar dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi antar periode waktu pada penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan uji autokorelasi antar *cross section* dengan menggunakan *Pesaran Test* pada hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Antar Cross Section

Pesaran's test of cross sectional independence =	3.360, Pr = 0.0008
--	--------------------

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel hasil autokorelasi antar *cross section* dengan menggunakan *Pesaran Test*, nilai probabilitas adalah sebesar 0,0008 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, terdapat masalah autokorelasi antar *cross section* pada penelitian ini sehingga akan dilakukan perbaikan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lagrange Multiplier LM Test =	62.72043
Degrees of Freedom =	28.0
P-Value > Chi2(28) =	0.00018

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas di atas, terlihat bahwa hasil (*p-value* > *chi2*) adalah sebesar 0,00018 atau berada di bawah 0,05. Dapat dikatakan bahwa masih terdapat masalah heteroskedastisitas pada penelien ini sehingga harus diperbaiki. Perbaikan masalah pada uji heteroskedastisitas akan dilakukan dengan menggunakan model *panels corrected standard errors* (PCSE).

Teknik Penentuan Model
Uji Hausman

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

<i>Effect Test</i>	Prob.
Chi square (3)	5.15
Prob > chi2	0.1610

Sumber: Data diolah (2024)

Pada tabel hasil uji hausman di atas, ditunjukkan bahwa nilai *probability chi square* adalah sebesar 0.1610 atau nilai *probability chi square* > 0.05. Maka, keputusan yang diambil adalah terima H_1 dengan REM sebagai model terpilih pada penelitian ini.

Interpretasi Model

Tabel 7. Hasil Regresi *Panel Corrected Standar Errors* (PCSE)

IKK	Coefficient	Std. err	z	P> z 	[95% conf. interval]	
LNJPN	.5012603	.1741829	2.88	0.004	.1598681	.8426526
TPT	-.2750211	.0648868	-4.24	0.000	-.402197	-.1478453
IPM	-.103232	.0196088	-5.26	0.000	-.1416646	-.0647994
_cons	7.833513	1.715793	4.57	0.000	4.470621	11.1964

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pengujian ini dianggap telah mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Diperoleh hasil regresi model PCSE dengan persamaan regresi data panel berikut:

$$\widehat{IKK} = 7.833513 + 0.5012603(LNJPN_{it}) - 0.2750211 (TPT_{2it}) - 0.103232 (IPM_{3it}) + e_{it}$$

Dari bentuk persamaan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- Konstanta (a) pada persamaan adalah sebesar 7.833513 yang menunjukkan nilai konstan. Apabila nilai semua variabel bebas adalah sama dengan nol maka variabel terikat Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah sama dengan 7.833513.
- Koefisien variabel Jumlah Penduduk adalah sebesar 0.5012603 yang menjelaskan bahwa apabila nilai variabel Jumlah Penduduk mengalami kenaikan sejumlah satu satuan dan variabel lainnya dengan nilai tetap, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0.5877014. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang positif antara variabel bebas Jumlah Penduduk dengan variabel terikat Indeks Kedalaman Kemiskinan, dalam artian bahwa apabila Jumlah Penduduk meningkat maka Indeks Kedalaman Kemiskinan akan meningkat.
- Koefisien variabel TPT adalah sebesar – 0.2750211 yang menjelaskan bahwa apabila nilai variabel TPT mengalami peningkatan sejumlah satu satuan dan variabel lainnya dengan nilai tetap, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.2750211. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang negatif antara variabel bebas TPT dengan variabel terikat Indeks Kedalaman Kemiskinan, dalam artian bahwa apabila TPT meningkat maka Indeks Kedalaman Kemiskinan akan menurun.
- Koefisien variabel IPM adalah sebesar – 0.103232 yang menjelaskan bahwa apabila

nilai variabel IPM mengalami kenaikan sejumlah satu satuan dan variabel lainnya dengan nilai tetap, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.103232. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang negatif antara variabel bebas IPM dengan variabel terikat Indeks Kedalaman Kemiskinan, dalam artian bahwa apabila Indeks Pembangunan Manusia meningkat maka Indeks Kedalaman Kemiskinan akan menurun.

Uji Signifikansi

Uji z (Pengujian Secara Parsial)

Pada tabel 7, model PCSE melahirkan beberapa hipotesis hasil sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap Jumlah Penduduk
 Nilai (prob > |z|) pada variabel Jumlah Penduduk adalah sebesar $0.004 < 0.05$ maka variabel bebas Jumlah Penduduk menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis H1 yang telah dibangun peneliti diterima atau akurat.
2. Pengujian terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
 Nilai (prob > |z|) pada variabel TPT adalah sebesar $0.000 < 0.05$ maka variabel bebas TPT menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis H2 yang telah dibangun peneliti diterima atau akurat.
3. Pengujian terhadap Indeks Pembangunan Manusia
 Nilai (prob > |z|) pada variabel IPM adalah sebesar $0.000 < 0.05$ maka variabel bebas IPM memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis H3 yang telah dibangun peneliti diterima atau akurat.

Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F

<i>Effect Test</i>	Prob.
Wald chi2(3)	428.20
Prob > chi2	0.0000

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil uji F pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,0000 yang berarti bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa seluruh variabel bebas pada penelitian ini, yaitu Jumlah Penduduk, TPT, dan IPM secara simultan mempengaruhi variabel terikat Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Uji Koefisien Determinasi (R-Squared)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	=	0.2687
Wald chi2(3)	=	428.20
Prob > chi2	=	0.0000

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil di atas, nilai R^2 adalah sebesar 0,2687 atau dapat diartikan bahwa sebesar 26,87 persen dari variabel bebas, yaitu Jumlah Penduduk, TPT, dan IPM mampu menjelaskan terkait pengaruhnya pada variabel terikat Indeks Kedalaman Kemiskinan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 73,13 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Nilai R^2 pada penelitian adalah sebesar 0,2687 atau masih berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Dapat dikatakan bahwa nilai tersebut berada pada rentang yang lumayan jauh dari nol.

Menurut (Ghozali, 2018), nilai R^2 yang tidak terlalu tinggi mengartikan bahwa kemampuan variabel-variabel bebas kurang dalam menjelaskan variabel terikat. Rendahnya nilai R^2 pada penelitian ini dikarenakan variabel-variabel bebas yang diteliti sebagai faktor yang dapat mempengaruhi variabel terikat memiliki pengaruh dan penjelasan yang kurang. Diketahui bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan sangatlah banyak dan variabel bebas yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagian kecil dari faktor yang dapat menjelaskan dan mempengaruhi kemiskinan. Selain itu, kemungkinan n atau jumlah tahun yang digunakan pada penelitian ini kurang panjang. Angka 73,13 persen sebagai sisa dari nilai *r-squared* yang diperoleh, menjelaskan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti PDRB, PMA, PMDN, Distribusi Pendapatan, Upah Minimum, Konsumsi, AHH, RLS, Angka Melek Huruf, dan lainnya.

Analisis Ekonomi dan Pembahasan

Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan

Pengujian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua. Peningkatan yang terjadi pada Jumlah Penduduk akan menyebabkan peningkatan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan, begitupun sebaliknya. Dengan begitu, hipotesis pertama yang telah ditentukan pada penelitian ini dapat diterima. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh kondisi tingginya indeks kedalaman kemiskinan di Papua yang diiringi oleh kenaikan jumlah penduduk di Provinsi Papua, terutama pada tahun 2017 – 2022. Hubungan signifikan positif antara jumlah penduduk dan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua dapat dilihat pada kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2019 dan 2022 yang selaras dengan kenaikan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2019 dan 2022.

Hasil penelitian sesuai dengan teori “An Essay on the Principle of Population” oleh Malthus yang mengasumsikan hubungan positif antara jumlah penduduk dan kemiskinan. Pada teori tersebut, Malthus menjelaskan bahwa populasi yang semakin tinggi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada meningkatnya biaya hidup yang secara langsung akan berakibat kepada kondisi kemiskinan. Tentu peningkatan jumlah penduduk yang dimaksud adalah peningkatan jumlah penduduk yang tidak diiringi oleh kualitas SDM yang mumpuni. Keberlanjutan dan peningkatan jumlah penduduk memang merupakan faktor pendukung yang penting dalam mendukung suatu permintaan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan apabila hal tersebut justru dapat menyebabkan permasalahan kemiskinan yang lebih serius apabila terus terjadi penambahan yang tinggi.

Hasil penelitian juga didukung oleh penelitian Puspita Candra Bella dan Syamsul Huda pada tahun 2023 yang juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk menunjukkan pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Penelitian ini menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di DI Yogyakarta yang tidak diimbangi oleh kualitas penduduk dapat menghambat proses pembangunan ekonomi sehingga menjadi penyebab meningkatnya kemiskinan di DI Yogyakarta.

Adanya tren meningkat jumlah penduduk pada setiap tahunnya di Provinsi Papua merupakan salah satu dampak dari adanya masa awal bonus demografi di Indonesia.

Berdasarkan hasil dari SP tahun 2022, komposisi jumlah penduduk di Provinsi Papua terdiri dari 4.418.581 jiwa dengan total laki-laki sebesar 53,15 persen dan total perempuan sebesar 46,84 persen. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengantarkan kepada berbagai masalah sosial seperti persaingan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan yang selalu terkait dengan kualitas dan daya saing SDM yang tinggi. Sementara itu, penduduk Papua dikatakan masih belum dapat bersaing karena memiliki kualitas SDM yang terbelang masih rendah. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa Papua masih berada pada kondisi miskin dan tertinggal dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu permasalahan yang dapat tercipta adalah pengangguran yang kemudian diikuti oleh munculnya kesenjangan sosial yang berimbas kepada kesejahteraan dan kemiskinan (Pemerintah Provinsi Papua, 2022).

Angka rata lama sekolah (RLS) menjadi acuan dalam kualitas pendidikan yang mencerminkan kualitas penduduk atau SDM pada suatu wilayah. Nilai RLS ini juga mempengaruhi indikator lainnya seperti IPM dan angka melek huruf. Nilai RLS Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah 7,02 tahun atau masih berada di bawah masa wajib belajar selama 12 tahun yang ditetapkan Indonesia. IPM Provinsi Papua adalah sebesar 61,39 persen atau lebih rendah dari nilai IPM Indonesia yang berada pada 72,91 persen. Terkait kesehatan penduduk, berdasarkan pernyataan dari BKKBN Papua, angka prevalensi stunting di Provinsi Papua berada pada urutan ketiga teratas yakni sebesar 34,6 persen menurut data pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022. Sementara itu pada tahun 2023, sebanyak 2.769 anak balita dari total 23.548 anak balita di Provinsi Papua terdeteksi mengalami stunting. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Papua masih memiliki permasalahan terkait kualitas SDM nya sehingga dapat dijadikan sebagai faktor dari tingginya kemiskinan di Papua.

Beberapa strategi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Papua terkait jumlah penduduk beserta kualitasnya sehingga membuat kenaikan pada jumlah penduduk dengan IKK adalah dengan mengadakan program Keluarga Berencana (KB) bertujuan mengendalikan jumlah penduduk melalui pengurangan angka kematian ibu dan anak serta mencegah stunting pada calon bayi. Program strategi kebijakan tersebut digerakkan BKKBN. Selain itu, pada RPJMD, ditetapkan Generasi Emas (Gemas) Papua yang berisi 10 program pembangunan berkelanjutan di sektor pendidikan guna memantapkan kualitas dan daya saing SDM.

Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan

Penelitian menghasilkan pernyataan bahwa hipotesis kedua yang telah ditentukan pada penelitian ini dapat diterima. Dengan kata lain, TPT berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan negatif antara TPT dan indeks kedalaman kemiskinan. Peningkatan yang terjadi pada TPT akan menyebabkan penurunan pada indeks kedalaman kemiskinan, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut dapat dilihat pada kenaikan TPT yang diiringi oleh penurunan indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2020 dan pada penurunan TPT yang diiringi oleh kenaikan indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2022.

Hasil penelitian selaras dengan teori Ragnar Nurkse (1953) yang menyatakan bahwa pengangguran menyebabkan kondisi kemiskinan. Seseorang yang miskin maka akan memiliki pendapatan yang rendah. Hal tersebut menyebabkan seseorang tersebut tidak berdaya untuk memiliki tabungan, bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh tidak dimilikinya pekerjaan yang dapat mendukung tingkat produktivitas serta sebagai sumber penghasilan sehingga tingkat kesejahteraan seseorang tersebut menurun. Menurunnya tingkat kesejahteraan ini akan berimbas secara langsung kepada kemiskinan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Murbanto Sinaga pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Kecamatan Batu Bara dan Kota Medan. Pada umumnya, seharusnya pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Adanya penurunan pada pengangguran seharusnya berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan pula. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang tidak berpenghasilan dan kesulitan memenuhi kebutuhannya semakin berkurang. Akan tetapi, tidak selamanya penurunan pada angka pengangguran selalu diikuti oleh penurunan pada angka kemiskinan. Faktor yang menjadi penyebab pengangguran pada penelitian yang dilakukan oleh Murbanto adalah faktor keluarga. Dalam hal ini, anggota keluarga yang telah memiliki pekerjaan lalu menghidupi anggota keluarga yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Selain itu, penduduk yang menganggur di Kecamatan Batu Bara dan Kota Medan didominasi oleh kalangan menengah atas dengan lulusan pendidikan tinggi. Pengangguran tersebut tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, tetapi tidak hidup dalam kemiskinan karena kehidupannya ditanggung oleh keluarga yang telah berada pada kalangan menengah tersebut. Budaya kekeluargaan tersebut masih sangat kental di Kecamatan Batu Bara dan Kota Medan.

Hal tersebut selaras dengan keadaan yang terjadi di Provinsi Papua bahwa rendahnya tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini tidak menjamin tingkat kemiskinannya menjadi rendah. Akan tetapi yang menjadi penyebab pengangguran pada penelitian ini bukanlah faktor keluarga, tetapi faktor komposisi tenaga kerjanya. Rendahnya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua didominasi oleh tenaga kerja yang masih bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan saja. Berdasarkan Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2022, tenaga kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Provinsi Papua mendominasi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase sebesar 71,49 persen. Hal ini terjadi tenaga kerja di Provinsi Papua didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah, tepatnya sekitar 1,1 juta jiwa atau sebesar 60,14 persen berpendidikan sekolah dasar ke bawah.

Tingkat pengangguran terbuka justru banyak terjadi pada sebagian besar tenaga kerja Papua yang berpendidikan tinggi yakni SMA/ sederajat pada persentase 45 persen. Sebagai contoh di Kota Jayapura, pada tahun 2021, pengangguran dengan lulusan pendidikan sekolah dasar ke bawah hanya sebesar 9,32 persen, sedangkan pengangguran dengan lulusan perguruan tinggi adalah sebesar 47,44 persen. Hal tersebut mendukung pernyataan bahwa pengangguran di Provinsi Papua didominasi oleh pengangguran terdidik. Sikap selektif tenaga kerja berpendidikan tinggi dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki menjadi penyebab tingginya pengangguran terdidik. Hal tersebut dikarenakan lapangan pekerjaan yang diharapkan tidak sesuai dan berjenis sektor informal. Sedangkan sektor pekerjaan yang diminati adalah sektor formal seperti PNS dengan tunjangan dan jaminan kerja yang lebih menjanjikan.

Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Papua tahun 2018, terdapat beberapa program strategi kebijakan yang telah dilakukan terkait permasalahan pengangguran terdidik di Papua. Program-program tersebut diantaranya adalah Pembekalan Wirausaha Baru (WUB), Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan, Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Para Pencari Kerja, Pameran Bursa Tenaga Kerja (Job Fair) Provinsi Papua, dan lainnya. Sementara itu program-program yang baru dilaksanakan di tahun terdekat ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) mengupayakan untuk memberikan dan menghubungkan fasilitas antara tenaga kerja atau Masyarakat yang memiliki ketertarikan berwirausaha dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dengan yang dapat memberikan modal atau bantuan usaha tanpa jaminan di bawah Rp 5.000.000. Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memotivasi masyarakat untuk berwirausaha dan menciptakan usaha sendiri sehingga

lapangan kerja dapat tercipta. Selain itu Disnakerduk juga melakukan program berupa kegiatan perluasan kerja melalui sistem teknologi tepat guna. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan mendidik tenaga kerja untuk dapat menciptakan lapangan kerja sebagai upaya mengurangi masalah pengangguran.

Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan

Penelitian menghasilkan pernyataan bahwa hipotesis ketiga yang telah ditentukan pada penelitian ini dapat diterima. Dengan kata lain, IPM berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan negatif antara IPM dan indeks kedalaman kemiskinan. Peningkatan yang terjadi pada IPM akan menyebabkan penurunan pada indeks kedalaman kemiskinan, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut dapat dilihat pada kenaikan IPM yang diiringi oleh penurunan indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2018 dan pada kenaikan IPM yang diiringi oleh penurunan indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2021.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori Ragnar Nurkse (1953) yang menyatakan bahwa kualitas baik yang dimiliki oleh seseorang mencerminkan bahwa seseorang tersebut dapat memperoleh dan memiliki standar hidup yang layak. Adanya produktivitas kerja yang tinggi yang tercipta dari kualitas individu yang baik tersebut akan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mansur Hany dan Ade Yunita Mafruh (2023) menjelaskan bahwa IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2010 – 2021. Dapat dijelaskan pada hasil penelitian tersebut bahwa apabila IPM mengalami kenaikan maka kemiskinan akan mengalami penurunan. Pengaruh signifikan negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan ini menandakan bahwa semakin baiknya ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di Provinsi Papua. Indeks pembangunan manusia dapat ditentukan dari ketiga komponen yaitu pengetahuan, standar hidup layak, serta umur panjang dan hidup sehat. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya penurunan pengeluaran per kapita yang terjadi pada tahun 2020 menjadi penyebab penurunan IPM di Papua apabila dilihat dari komponen standar hidup layak. Kedua komponen lainnya yaitu pengetahuan dan umur panjang dan hidup sehat tetap mengalami pertumbuhan di Provinsi Papua. Hasil penelitian didukung oleh data BPS yang menunjukkan adanya peningkatan pada IPM ini disertai oleh penurunan kemiskinan di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Penelitian tersebut sesuai dengan keadaan pada hasil penelitian ini dimana peningkatan nilai IPM disertai oleh adanya penurunan indeks kedalaman kemiskinan di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Misalnya Kabupaten Mappi, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Keerom, Kabupaten Intan Jaya, dan Kota Jayapura. Akan tetapi, IPM yang berada pada kategori sedang di Provinsi Papua ini tidak menjamin tingkat kemiskinannya menjadi rendah. Nilai IPM di Provinsi Papua masih berada di bawah nilai IPM tingkat nasional dan masih berada pada posisi paling rendah se-Indonesia di tiap tahunnya. Disparitas pembangunan manusia juga masih terjadi apabila dilihat dari nilai IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dari total seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Papua, terdapat 12 kabupaten dengan nilai IPM yang lebih tinggi dari IPM Provinsi Papua sendiri. Sedangkan 17 kabupaten lainnya memiliki nilai IPM lebih rendah dari IPM Provinsi Papua. Perbedaan latar belakang, sosial, ekonomi, dan geografi merupakan penyebab terjadinya disparitas capaian pembangunan manusia di Provinsi Papua. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Papua didominasi oleh masyarakat berpendidikan rendah sehingga produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang tercipta pun rendah.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait misi memantapkan kualitas dan daya saing SDM dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua tahun 2019 – 2023 di antaranya adalah program prioritas Generasi Emas (Gemas) Papua yang bergerak pada bidang pendidikan berupa program-program pembangunan, pengembangan, dan peningkatan pada infrastruktur pendidikan. Selain itu, terdapat pula program Infradas Papua yang meliputi program penyediaan dan peningkatan air bersih, pengelolaan sampah, sistem sanitasi, dan air limbah. Kemudian dalam bidang pangan, pemerintah menjalankan program Mandiri Pangan Papua berupa penguatan kemandirian kampung dalam mengelola pangan secara mandiri. Selain itu pada bidang peningkatan prestasi dan daya saing, pemerintah menjalankan program Sukses PON XX Papua yang terdiri dari prestasi kepemudaan, penyelenggaraan sarana dan prasarana PON, dan pemanfaatan kegiatan PON untuk peningkatan ekonomi Masyarakat.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai pengaruh jumlah penduduk, TPT, dan IPM terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2017 – 2022 didapatkan kesimpulan dimana variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua. Jumlah penduduk atau populasi yang semakin tinggi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada meningkatnya biaya hidup yang secara langsung akan berakibat kepada kondisi kemiskinan. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Papua seharusnya diiringi oleh adanya upaya peningkatan kualitas SDM sehingga tingkat kemiskinan dapat menurun. Variabel TPT berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua. Hal tersebut berarti kemiskinan dapat terjadi karena adanya pengangguran. Seseorang yang menganggur maka tidak memiliki sumber penghasilan sehingga tingkat kesejahteraan seseorang tersebut menurun. Menurunnya tingkat kesejahteraan ini akan berimbas secara langsung kepada kemiskinan. Variabel IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keberhasilan dari pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh adanya peningkatan kualitas SDM yang ditandai oleh peningkatan pada IPM yang sejalan dengan peningkatan produktivitas sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk dapat mempertahankan laju IPM di Provinsi Papua yang cenderung meningkat setiap tahunnya tentu peningkatan IPM yang diharapkan adalah peningkatan yang diiringi oleh kualitas manusia yang riil sehingga berdampak positif pada berbagai aspek terutama pada penurunan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan, hingga penurunan angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon, M. J., & Jeraman, G. T. (2023). Kontribusi Teori Kemiskinan Sebagai Deprivasi Kapabilitas dari Amartya Sen dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal Masyarakat Madani*, 8(1), 1–20.
- Agus Triono, T., Candra Sangaji, R., Program, D., & Bisnis dan Ekonomi, F. (n.d.). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. <https://www.bk3s.org/ojs/index.php/jsb>

- Agustina, E. S., Syechalad, Mohd. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 270–271.
- Ahmaddien, I. (2019). Faktor determinan keparahan dan kedalaman kemiskinan jawa barat dengan regresi data panel. *FORUM EKONOMI*, 21(1), 87–96.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Culture of Poverty in Poverty Reduction in Indonesia). *E-Journal Kemensos - Sosio Informa*, 6(02).
- Atmanti, H. D. (2017). Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Mazhab Klasik dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEB)*, 2(2), 511–524.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2021). *Provinsi Papua Dalam Angka 2021*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). *Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2022*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik. (2023, October 17). *Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan*. Badan Pusat Statistik.
- Bella, P. C., & Huda, S. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 480-488.
- Florenxia, E., & Karmini, N. L. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(09), 1040–1049.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika*. In *Basic Econometrics* (pp. 235-255). Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, A. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002-2015. *Jurnal EKBIS*, XIX (1), 1024–1038.

- Hany, M., & Mafruhah, A. Y. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2010-2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 149-156.
- Mubarak, R. (2021). *Pengantar Ekonometrika* (F. Firmansyah & F. Nuryana, Eds.; Pertama). Duta Media Publishing.
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua. (2022). *Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua 2021*.
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 129. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- Sinaga, M. (2020). Analysis of Effect of GDRP (Gross Regional Domestic Product) Per Capita, Inequality Distribution Income, Unemployment and HDI (Human Development Index) on Poverty. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 2309-2317.
- Tambun, J. M. S., & Herawaty, R. (2018). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 100–110. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>
- UNDP (United Nations Development. (1990). *Human Development Report 1990*. In UNDP (United Nations Development Programme).
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, 8(3), 176–185.
- Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS* (S. Widagdo, Ed.; pertama). Mandala Press.